

**PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PILKADA BUPATI TAHUN 2015
DI DESA TITIAN KUALA KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Oleh
ELLY MASTARINI
NIM. E02112003

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

E-mail : ellymstarini@yahoo.com

Abstrak

Pemilu merupakan salah satu pesta rakyat terbesar yang di gelar 5 tahun sekali di Indonesia, ditahun-yahun politik ini banyak terjadi fenomena sosial yang mungkin sangat sering dilakukan oleh politisi yang haus akan kekuasaan. Banyak kecurangan yang terjadi di hari pemungutan suara , bahkan banyak pula fenomena itu terjadi sebelum hari H pemilu. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Derah Pasal 56 serta Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Derah Pasal (PP) No. 6/2005 tentang Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala daerah tentunya berkaitan dengan perilaku politik. Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan orang perorangan. Dalam hal ini peran masyarakat menjadi tujuan utama sebagai perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati), dan mempunyai hak pilih dalam memilih pemimpin, juga berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis (Dennis Kavanagh), ilmu yang beorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realita untuk mengungkapkan faktor perilaku pemilih pada Pilkada Bupati tahun 2015 di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau berdasarkan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Persoalan pokok yang hendak dijelaskan oleh teori ini menyangkut persoalan ilmu sosial itu sendiri, yakni bagaimana didalam permasalahan yang terjadi dalam pemilihan Pilkada Bupati tahun 2015 dilakukan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, kekeluargaan, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Kata-kata Kunci : Perilaku pemilih, Masyarakat.

**VOTERS' BEHAVIOUR IN THE 2015 REGENT ELECTION IN TITIAN KUALA
VILLAGE SELIMBAU SUB-DISTRICT KAPUAS HULU REGENCY**

Abstract

Election is one of the biggest celebration held once in 5 years in Indonesia. In these political years many social phenomena happen and were done by politicians with power lust. However many frauds occur on and prior to the election day. Direct regional elections was regulated in Law No. 32/2004 on Regional Governance articles 56 to 119 and Government Regulation No. 6/2005 on the Election, Approval, and Dismissal of the regional head and the regional deputy head. The stipulation of direct regional elections is explicitly reflected in the election process and the principles of regional election implementation. In article 56 verse (1) state : “regional head and regional head deputy are elected in candidate pair democratically based on being direct, general, free, secret, honest, and fair.” The regional head election indeed relates to political behaviour. Political behaviour refer to the

goals of the society, the policy to achieve these goals, and the governance system which allows an authority to manage public affairs generally and not individual purpose. Here the role of the community is the main purpose of voters' behaviour in regional elections, and has the rights to vote the leader, also has a right to participate in general elections. This research is a qualitative with descriptive method. The writer used sociological and psychological approach theory (Dennis Kavanagh), a study concerned to obtain explanation of reality to reveal the factors that influence voters' behaviour in the 2015 regent election in Titian Kuala Village Selimbau Sub-District. The main question to be answered by this theory concerning to its social science is the using of sociological approach to find out the problems occur in the 2015 regional election. This sociological approach describes social characteristics and age classification, gender, religion, occupation, background, relatives, formal and informal group activities and so on give influence to create voters' behaviour.

Keywords : Voters' behaviour, Society.

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pesta rakyat terbesar yang di gelar 5 tahun sekali di Indonesia, ditahun-yahun politik ini banyak terjadi fenomena sosial yang mungkin sangat sering dilakukan oleh politisi yang haus akan kekuasaan. Banyak kecurangan yang terjadi di hari pemungutan suara , bahkan banyak pula fenomena itu terjadi sebelum hari H pemilu. Dalam hal ini peran masyarakat menjadi tujuan utama sebagai perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati), dan mempunyai hak pilih dalam memilih pemimpin, juga berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari pandangan bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Karena itu, pemilihan kepala

daerah secara langsung merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk meningkatkan legitimasi pemerintah daerah.

Pada tanggal 9 desember 2015 merupakan sejarah baru untuk beberapa kota yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Sekecamatan serentak di Kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan satu dari 269 daerah yang menggelar Pilkada serentak Desember 2015. Termasuk juga pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas Hulu dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati A.M. Nasir, SH-Antonius L.Ain Pamero, SH (Sekaban) no. urut 1 dengan diusung 9 partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Partai PKP-Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) dan Fransiskus Diaan, SH- Andi Aswad,

SH (Menyadik) no. urut 2 yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 serta Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Daerah Pasal (PP) No. 6/2005 tentang Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan kepala daerah tentunya berkaitan dengan perilaku politik. Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan orang perorangan. Menurut Huntington dan Nelson (1994: 116-127), perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai preferensi yang melestarikannya.

Dalam konteks Pilkada, partisipasi politik warga saat pemilihan pun berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, maka warga diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye. Pada saat masyarakat menghadiri kampanye dan melihat salah satu calon kepala daerah menawarkan program kerja yang ternyata relatif sama dengan apa yang ada dalam benaknya/preferensinya (tentang kesejahteraan dan pemberdayaan), maka tentu saja (bisa sangat mungkin) masyarakat atau individu tersebut memilih calon tadi. Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson (1994:5) adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (action) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi politik individu di dalam agregasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks pilkada hasil-hasil survey yang mengawali pesta demokrasi di level lokal kadang kala tidak terlalu cocok dengan realitasnya. Hal ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh karena

terjadinya pergeseran pilihan kepada calon-calon pasangan kepala daerah. Masyarakat semakin hari semakin pintar dengan berkaca pada hasil-hasil pilkada di daerah lain yang sudah lebih dulu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Mereka dapat merefleksikan Pilkada ditempat lain dengan di daerahnya sebagai manifestasi keinginan warga untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik dan mau berjuang demi kemajuan daerah. Refleksi dari tempat lain sangat dipengaruhi oleh persepsi pemilih. Persepsi terhadap pasangan calon kepala daerah atau persepsi sosial bisa berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh jenis faktor pengalaman, faktor selektifitas, faktor dugaan, faktor evaluatif, dan faktor kontekstual. Persepsi pemilih, sedikit banyaknya, akan sangat bergantung pada pengalamannya (Mulyana, 2001: 176-196; Fisher dan Adam, 1994: 57-60). Hal ini nampak juga cara orang berkampanye, menilai jejak rekam pasangan calon, dan sebagainya, dimana semua itu bergantung pada pengalaman sebelumnya yang melatari orang tersebut. Sudut pandang disini seperti yang saya teliti masyarakat di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu pada pilkada Bupati 2015 antara pasangan A.M.Nasir, SH-Antonius L.Ain Pamero ,SH (Sekaban) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati no.urut 1 dan pasangan Fransiskus Diaan, SH-Andi

Aswat, SH (Menyadik) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati no.urut 2 bahwa dalam hal kedua calon-calon kandidat tersebut dalam kampanye tentunya masyarakat sudah menilai bagaimana pengalaman kepemimpinan yang terdahulu baik antara pasangan Nasir-Anton dan pasangan Sis-Andi, memiliki pengaruh kuat karakter pemimpin daerah dan mengetahui riwayat hidup yang dirincikan pada team sukses terhadap partai politik, serta bisa memberikan pandangan pembangunan bagi daerah untuk kedepannya selama 5 tahun periode yaitu dari 2016-2021.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat daerah menjadi sebuah indikator tegaknya demokrasi di Indonesia. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk perbaikan sistem masa transisi dari orde baru ke era reformasi. Dalam hal ini juga prefensi politik pemilih tidak bisa dilepaskan dari seting sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat (norma sosial, tingkat pendidikan, afiliasi pekerjaan, agama, dan status sosial dalam masyarakat). Norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat turut serta membentuk persepsi masyarakat dalam memandang figur seorang pemimpin. Setidaknya ada norma umum yang berlaku di kalangan masyarakat di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu bahwa seorang

pemimpin secara personal harus mempunyai kepribadian yang baik, merakyat, serta mempunyai kharisma. Tiga elemen yang turut bermain dalam arena Pilkada (kandidat, broker (panutan), dan pemilih). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau tahun 2015 perolehan suara bahwa yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada Bupati di Kecamatan Selimbau yang terdiri dari 17 kecamatan sebanyak 7.774 pemilih (jiwa) pasangan Nasir-Anton (Sekaban) unggul dengan suara pemilih 5.245 suara (67%), sedangkan pasangan Sis-Andi (Menyadik) tidak unggul dengan suara 2.529 suara (33%).

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana perilaku pemilih berdasarkan faktor sosiologis dan faktor psikologis dalam menjatuhkan pilihan kepada calon Bupati dan wakil Bupati di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015”.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berusaha

menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang berkaitan dengan ini dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di Desa Titian Kuala. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah tempat peneliti bertempat tinggal, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti untuk mendapatkan data baik dari masyarakat maupun dari instansi yang terkait dengan penelitian nantinya. Selain itu akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mempermudah dalam hal memperoleh data dari para responden.

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah “*Porpusive Sampling*”. Yaitu penarikan sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh penulis berdasarkan kriteria yang dimaksud adalah Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perilaku pemilih masyarakat dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilih masyarakat dan komponen-komponen yang terkait langsung dengan Pilkada Bupati Tahun 2015 di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun orang-orang yang menjadi informan dalam subjek penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Desa Titian Kuala
- b. Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Titian Kuala

- c. Tokoh masyarakat ikut memilih yang mewakili di Desa Titian Kuala (35 orang) .

C. TEMUAN

Untuk membentuk kehidupan demokrasi pada masyarakat yang ada di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau pada khususnya, maka Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih pemimpinnya pada Tanggal 9 Desember 2015 dan telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung berdasarkan amanat perundang-undangan yang berlaku kabupaten/ lainnya di Kalimantan Barat yaitu: Sintang, Melawai, Sekadau, Ketapang, Sambas serta Bengkayang. Pada tanggal 9 desember 2015 merupakan beberapa kota/kecamatan yang melakukan menyelenggarakan dan ikut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah yaitu pemilihan Bupati termasuk masyarakat di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau yang ikut mensukseskan demokrasi dengan cara memberikan hak suaranya pada saat pemilu.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dilaksanakan secara langsung dan serentak pada 9 Desember tahun 2015 yang bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati di beberapa kabupaten/ lainnya di Kalimantan Barat yaitu: Sintang, Melawai, Sekadau, Ketapang, Sambas serta Bengkayang. Pada tanggal 9 desember 2015 merupakan beberapa kota/kecamatan yang melakukan menyelenggarakan dan ikut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah yaitu pemilihan Bupati termasuk masyarakat di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau yang ikut mensukseskan demokrasi dengan cara memberikan hak suaranya pada saat pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa latar belakang asal daerah memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di Desa Titian Kuala. Latar belakang asal daerah seorang calon sangat penting, karena setiap individu memiliki latar belakang yang penting dari daerah asalnya dalam membangun individu tersebut. Apalagi masyarakat sudah pintar dalam menentukan hak pilihnya pada Pilkada Bupati tahun 2015. Sudah barang tentu masyarakat mencari informasi latar belakang setiap calon Kepala Daerah yang akan mereka pilih, apabila mereka memiliki latar belakang yang sama seperti berasal dari Daerah/Kota yang sama maka akan semakin meningkatkan aksebilitas calon tersebut.

D. ANALISIS

Berdasarkan hasil temuan diatas, ditemukan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa ternyata Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Titian Kuala bahwa pemilih mengenal para kandidat tersebut melalui dengan menilai kandidat tersebut dari beliau pernah menjabat selama 1 periode sebagai Bupati, dalam pengalamannya memimpin wilayah Kapuas Hulu, serta melihat dari kharisma kandidat tersebut layak atau tidak jadi pemimpin dan visi dan misi kandidat ketika kampanye.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan emosional yang dibangun melalui penilaian terhadap figur seorang kandidat antara kontestan dengan konstituen cukup ampuh mempengaruhi para pemberi suara. Masyarakat lebih mengarah pilihannya atas dasar pertimbangan figur seorang kandidat baik sebagai hasil sosialisasi secara langsung oleh si calon maupun sosialisasi yang dilakukan oleh para juru kampanye.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, terutama di Desa Titian Kuala para pemilih menjatuhkan pilihannya tidak semata-mata karena tertarik pada visi, misi dan program kerja partai-partai tersebut atau pasangan calon yang diusung, tetapi juga karena adanya tokoh-tokoh yang populer,

kharismatik, dan dekat dengan rakyat (populis).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa terlihat terutama pemilih masyarakat di Desa Titian Kuala sudah lumayan banyak mengenal dan mengetahui partai yang ikut mengusung dan berpartisipasi dalam pemilu dari beberapa partai yang hadir dalam kampanye pada saat pemilu tiba. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa disini peneliti menemukan adanya pengaruh kecendrungan perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dengan adanya faktor lain yang sangat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Desa Titian Kuala dalam menentukan pilihannya yaitu faktor politik uang (*money politic*). Istilah politik uang (*money politics*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk

menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Apabila penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai *money politics*, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Indra J. Piliang (2011) menyatakan bahwa dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan umum, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala desa itu terpilih, lalu dianggap melakukan politik uang, tentu akan menghadapi krisis multilevel dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal. Ada 2 subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu

sekejap, demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada caleg yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang didalamnya terindikasi politik uang. Jadi disini dapat dijelaskan bahwa masyarakat memilih acuh tak acuh dengan adanya pemilu, politik uang tidak ada masalah bagi mereka. Bagi mereka asalkan sudah mendapatkan uang yang jelas mau memilih calon kandidat tersebut apa tidak bagi mereka tidak ada permasalahan. Karena disini perilaku pemilih akibat dengan adanya *money politics* dimasyarakat adalah seseorang memilih caleg bukan karena idealismenya tetapi berdasarkan lingkungan disekitarnya yang memberikan uang dan pengaruh dari tetangganya. Dengan kata lain, masyarakat gampang ikut-ikutan lingkungannya. Temennya kebarat dia ikut kebarat, temennya masuk sumur, dia juga ikut masuk sumur. Hal ini terjadi karena fikiran itu terbentuk karena pengaruh lingkungan disekitarnya. Karena lingkungan tersebut juga dikatakan materi. Bahwa disini masyarakat terpaku dengan sogokan para kandidat sehingga mereka memilih dalam pecoblosan pemilu, bagi mereka tidak mementingkan bahwa politik uang itu dosa atau tidak, hal tersebut bagi

mereka merupakan hal yang tidak dipikirkan. Dalam hal ini bagi mereka tanpa ada uang maka tidak akan bisa berjalan suatu kinerja dalam hal memilih calon kandidat tersebut. Kepentingan akan kebutuhan suatu uang merupakan hal yang sangat penting bagi mereka dalam melakukan pilihannya.

Dalam memilih tentunya masyarakat akan melihat dari visi dan misi pasangan calon kandidat tersebut, maka dari itu peneliti menjelaskan visi dan misi antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2016-2020 A.M.Nasir, SH-Antonius L.Ain Pamero, SH dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fransiskus Diaan, SH- Andi Aswad, SH.

Visi dan Misi pasangan calon A.M.Nasir, SH dan Antonius L.Ain Pamero, SH :

• **Visi**

Beranjak dari pengalaman yang utuh terhadap kondisi kabupaten Kapuas Hulu serta upaya memberikan arah perubahan yang lebih baik maka untuk lima tahun kedepan dalam pemerintahan kami akan dipandu visi yaitu “Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, dan Harmonis”.

1. Lebih sejahtera adalah terwujudnya kondisi lingkungan yang mampu mendorong masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik ekonomi dan sosial serta meningkatkan hasil pembangunan yang telah dicapai secara berkelanjutan.

2. Berdaya saing adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensial unggulannya untuk meningkatkan produktivitas daerah.
3. Harmonis yaitu menggambarkan suatu kondisi hubungan yang harmoni antara anggota masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya serta menggambarkan kserasian dalam proses pembangunan daerah sehingga tidak menimbulkan ekses terhadap lingkungan, sosial, budaya, maupun hak asasi manusia.

• **Misi**

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang

bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Visi dan Misi Fransiskus Diaan, SH dan Andi Aswad, SH

• Visi

Berangkat dari agenda prioritas pembangunan yang ditawarkan tersebut, maka dalam upaya menentukan arah, kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2015-2020 yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai guna menyatukan komitmen seluruh pihak pemangku kepentingan, maka Visi pembangunan Kapuas Hulu 2015-2020 yang ditawarkan sebagai berikut: “Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Sehat, Cerdas, Aman, Beriman, dan Berbudaya.”

• Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kejahatan, pendidikan,

agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.

6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta

mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan dan pesisir sebagai sumber potensi ekonomi.

10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mencoba menganalisis hasil wawancara dengan informan. Peneliti menganalisis tentang konsep Dalam hal ini tidak semuanya faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di Desa Titian Kuala dalam menjatuhkan pilihannya yaitu untuk lebih jelas berikut pembahasannya :

, yaitu :

1. Dalam proses pilkada, banyak sekali faktor yang terlibat serta banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, termasuk memilih dari segi etnis. Dalam pemilihan kepala daerah ini calon Bupati tersebut ada yang dari segi etnis melayu dan dayak. Setiap pemilihan daerah yang terjadi sering kali ditemukan banyaknya masyarakat yang masih mementingkan etnisnya untuk dipilih menjadi pemimpin, bahkan diantara masyarakat pernah terjadi adu mulut dalam pemilihan. Banyak orang-orang

awam yang masih berpikir bahwa dengan memilih etnisnya itu lebih baik dan bahkan lebih dipercaya ketika menjadi pemimpin, anggapan itulah yang dapat mempengaruhi Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun diketahui ada beberapa masyarakat yang ketika pemilihan daerah mereka tidak memandang etnisnya karena mereka berpikir bahwa ketika mementingkan etnisnya sedikit kemungkinan kemajuan terjadi apabila etnisnya (etnis melayu dan etnis dayak) berhasil memenangkan dalam suatu pemilihan daerah. Yang mana sudah banyak terjadi pemimpin yang menang dalam suatu pemilihan daerah bisa dikatakan tidak adanya kemajuan yang terjadi di daerah Kecamatan Selimbau, dan saat itulah kekecewaan yang terjadi pada masyarakat yang telah memilih pemimpin tersebut. Etnis merupakan faktor terbesar dalam pemilihan daerah yang hampir 90% masyarakat terpengaruh untuk memilih etnisnya sendiri, itu dikarenakan tidak adanya pemikiran yang kreatif dalam memilih etnis lain. Sebagai buktinya ketika pemilihan daerah dimenangkan oleh pihak dengan no.urut 1 (A.M.Nasir/Lay dan L.Ain Pamero) tidak adanya kemajuan yang terjadi khususnya di Kecamatan Selimbau, seperti kemajuan infrastruktur.

2. Status sosial merupakan sesuatu tentang kehidupan seseorang seperti latar belakang seseorang dari segi kehidupan orang miskin atau kaya, pangkat yang tinggi, asal daerah, kekerabatan, pekerjaan. Ketika pemilihan kepala daerah masyarakat lebih melihat dari status sosial yaitu asal daerah, kekerabatan, dan pangkat.
3. Agama merupakan landasan mental spiritual yang sangat kuat, bagi umatnya berguna untuk menilai mana yang baik dan tidak, mana pemimpin yang baik dan tidak. Agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan Kepala Daerah, maka tidak sedikit masyarakat yang masih berpikir bahwa dengan memilih Kepala Daerah dengan agama yang sama maka itu lebih baik ketika menjadi pemimpin sementara itu ada juga masyarakat yang ketika terjadi pemilihan daerah tidak memandang dari segi agama yang mana bisa dikatakan netral. Kenyataan yang terjadi dikalangan masyarakat mereka masih enggan bahkan tidak mau memilih pemimpin yang beragama lain dari mereka sebagai contoh salah satu individu beragama islam maka dia memilih pemimpin yang beragama islam, pemikiran yang seperti itulah masih sangat masih melekat di setiap pemikiran di masyarakat yang ada.

4. Penilaian terhadap kandidat mengacu pada persepsi dan sikap seseorang pemilih terhadap kepribadian kandidat tanpa mempedulikan label partai yang mengukung kandidat tersebut. Penilaian pemilih juga sangat dipengaruhi oleh sejarah pengalaman masa lalu dari kandidat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Identifikasi partai diartikan sebagai ikatan psikologis seseorang kepada suatu partai tertentu. Dengan adanya partai jelas sangat mempengaruhi dalam menjatuhkan pilihan politik, terutama pada masyarakat di Desa Titian Kuala yang dianggap sudah banyak pengalaman dalam mengikuti pemilu tentunya masyarakat di Desa Titian Kuala akan menilai latar belakang, kepemimpinan, dan kualitas para tokoh-tokoh partai politik dengan pandangan mereka masing-masing.
6. Istilah politik uang (*money politics*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

E. KESIMPULAN

1. Faktor Etnis, dalam faktor ini masyarakat sangat cenderung memilih pemimpin yang beretnis melayu, terlebihnya A.M.Nasir/Lay yang berasal dari etnis melayu sangat diunggulkan, karena masyarakat daerah Desa Titian Kuala merupakan daerah yang berdominasi oleh etnis melayu.
2. Faktor Status Sosial, terutama latar belakang asal daerah dalam hal ini masyarakat lebih cenderung memilih A.M.Nasir/Lay yang berasal dari Kapuas Hulu (Bunut) sangat diunggulkan, karena kalau pemimpin sama satu daerah sudah tau bagaimana baik dan buruknya dalam memimpin kedepannya.
3. Faktor Agama, faktor ini merupakan salah satu faktor yang paling dominan pada masyarakat Desa Titian Kuala. Perlu diketahui bahwa pasangan calon no.urut 1 A.M.Nasir/Lay beragama islam, sedangkan pasangan calon no. urut 2 Fransiskus Diaan beragama kristen. Dalam hal ini masyarakat Desa Titian Kuala berdominasi agama islam,

jelaslah masyarakat memilih pasangan calon no.urut 1 A.M.Nasir/Lay yang beragama islam. Maka dari itu mereka menilai kalau pemimpin sesama satu agam akan lebih nyaman.

4. Faktor Penilaian Kandidat mempunyai pengaruh yang dominan pada masyarakat Desa Titian Kuala dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2015. Karena kemenangan A.M.Nasir/Lay dipengaruhi oleh citra kandidat. Dalam hal ini masyarakat melihat dari pengalaman pada saat menjadi seorang Bupati selama satu periode dan menjabat selama dua periode sebagai anggota DPR. Hal tersebutlah menjadikan pasangan ini mempunyai penilaian citra yang baik dimasyarakat.
5. Faktor Identifikasi Partai dalam hal ini masyarakat Desa Titian Kuala sudah cukup mengenal partai-partai yang diusung oleh setiap kandidat yang mereka pilih.
6. Dari point-point kesimpulan ini dapat ditegaskan bahwa yang menonjol dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis

dan pendekatan psikologis, sementara pendekatan rasional tidak ditemukan di lokasi penelitian. Selanjutnya dalam penelitian faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Desa Titian Kuala yaitu faktor politik uang (*money politics*) bahwa dalam faktor ini masyarakat bersikap acuh tak acuh dalam melakukan pilihannya, intinya masyarakat memilih hanya mengambil uangnya saja, untuk hal memilih dan memilih calon kandidat tersebut tidak ada permasalahan bagi mereka.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan agar masyarakat di Desa Titian Kuala tidak terpaku hanya melihat faktor etnis, agama, latar belakang, penilaian terhadap kandidat, dan identifikasi partai dalam menentukan pilihan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati seharusnya masyarakat

dapat meninjau kembali bahwa menggunakan hak pilihnya tidak mengenal golongan dan adanya preferensi politik di masyarakat mengenai tipikal pemimpin yang baik. Sehingga masyarakat tidak akan menyesal jika memilih pasangan yang telah mereka pilih seleksi secara mendalam.

2. Peneliti juga menyarankan agar masyarakat di Desa Titian Kuala dalam melakukan pilihan kepada kandidat tidak melihat dari seberapa banyak kandidat memberikan uang atau politik uang (*money politic*), dan tidak terpaku dengan adanya politik uang. Sebaiknya masyarakat harus perlu ada kesadaran pada diri masing-mereka bahwa memilih karena hanya untuk mendapatkan uang itu tidak baik dan seharusnya lebih baik memilih dengan hati yang bersih tanpa harus menerima sogokan dari setiap kandidat.
3. Peneliti juga menyarankan sebagai bagian dari masyarakat juga harus cerdas dalam memilih para calon pemimpin kita. Maka dari itu kita harus bersikap tegas dan

menolak upaya-upaya *money politic*. Melalui pemilu juga sebenarnya rakyat telah belajar dari pengalaman dan dituntut menjadi cerdas dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin rakyat berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu terdahulu. Dan sebagai seorang pemilih cerdas, maka patut mempertimbangkan kapasitas calon wakil rakyat dan kualitas sumber daya manusia mulai dari latar belakang pendidikan atau keilmuan, pengalaman, keterampilan teknis, hingga kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskannya menjadi kebijakan publik. Pemilih juga harus perlu mencermati dengan adanya *track record* atau rekam jejak calon pemimpin maupun partai pengusungnya dan masyarakat harus mengambil sikap sebagai pemilih murni dan cerdas, siap melaporkan setiap praktik *money politic*, dan mengikuti pendidikan moral.

4. politik Perlu diadakannya kajian tentang perilaku politik lebih mendalam, dan perhatian pemerintah terhadap pemilih bukan hanya setelah kepentingan mereka terpenuhi kemudian pemilih ditinggalkan.

G. REFERENSI

Buku :

Agustino,Leo. 2009. **Pilkada dan Dinamika Politik Lokal**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, Rozali, SH. 2009. **Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dr.Anggara,Sahya,M.Si. 2013. **Sistem Politik Indonesia**. Bandung: Pustaka Setia.

Harrison, Lisa. 2007. **Metodologi Penelitian Politik**. Jakarta: Kencana.

J.Moleong, Lexy,MA. 2013. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2015. **Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)**. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mariana,Dede dan Caroline Paskarina. 2008. **Demokrasi & Politik Desentralisasi**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mustofa, Syahrul. 2005. **Pilkada Langsung Sebuah Demokrasi Lokal**. Sumbawa Barat. Komisi Pemilihan Umum.

Prihatmoko, J. Joko. 2005. **Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem**

dan Problema Penerapan di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, Husaini, M.Pd.,M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2009. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta: Bumi Aksara.

Riduwan. 2012. **Metode dan Teknik Menyusun Proposal**. Bandung: Alfabeta.

Sastro, Sudijono. 1995. **Perilaku Politik**. Semarang: ISIP Semarang.

Satori, Djam'an,M.A dan Dr.Aan Komariah, M.Pd. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.

Skripsi:

Maisarah. 2015. *Faktor-faktor Perilaku Pemilih Masyarakat Madura di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pertiwi, Isnanda. 2015. *Perilaku Pemilih Perempuan Etnis Jawa Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2012 (Studi Kasus Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya)*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Raziki,M. 2015. *Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sumber dari internet :

<http://digilib.unimus.ac.id/filesdisk1102jptpu-nimus-gdl-mariskaama-5089-3-bab2.pdf>.

Diunduh tanggal 12 Desember 2015 Pukul 13:00 Wib.

Diunduh tanggal 4 Januari 2016 Pukul 20:05 Wib.

<http://journal.uajy.ac.id/182721HK09514.pdf>.
Diunduh tanggal 12 Desember 2015 Pukul 14:00 Wib.

http://eprints.walisongo.ac.id/915/4/083611030_Bab3.pdf. Diunduh tanggal 9 Desember 2015 Pukul 14.30 Wib.

<https://beritaborneo.com/face-to-face-fransiskus-aswad-dan-nasir-anton>.
Diunduh: tanggal 14 Desember 2015.
Pukul 20:25 Wib

<https://beritaanda.com/index.php/suara-pemilu/8038-pasangan-nasir-anton-diusung-9-parpol>. Diunduh senin 14 Desember 2015 . Pukul 20:28 Wib.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117259&val=5336>. Diunduh tanggal 2 Januari 2016 Pukul 21:00 Wib.

<http://fitrienurani.blogspot.com/2013/05/revitalisasi-kesadaran-politik-dalam.html>.
Diunduh tanggal 2 Januari 2016 Pukul 21:15 Wib.

<http://www.nusaputera.org/2010/08/pengajaran-pendidikan-politik-dasar.html>. Diunduh tanggal 3 Januari 2016 Pukul 09:00 Wib.

https://www.google.co.id/search?q=rumusan+masalah+tentang+perilaku+politik+pemilih+pemula&oq=rumu&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.4883j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8. Diunduh tanggal 3 Januari 2016 Pukul 09:00 Wib.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perilaku-pemilih-politik-dalam-pemilu.html>.
Diunduh tanggal 3 Januari 2016 Pukul 17:06 Wib.

<http://lannylameanda.blogspot.co.id/2012/12/definisi-jenis-jenis-dan-perbedaan.html>.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Elly Mastarini
NIM / Periode lulus : E02112003 / 2016 - 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP/IA
E-mail address/ HP : ellymastarini@yahoo.com / 085751570702

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Elly Mastarini pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Perilaku Pemilih Masyarakat Pada Pilkada Bupati Tahun
2015 di Desa Titiang Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten
Kapuas Hulu

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 29 November 2016

Elly Mastarini
NIM. E02112003

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)